

Nama Kelompok 9 : 1. Nurida Elsa 2313031012  
2. Eris Ana Dita 2413031017  
3. Serly Natasa 2413031028  
Kelas : 24 A  
Mata Kuliah : Teori Akuntansi

### **NOTULENSI PRESENTASI**

#### **Tanya Jawab :**

##### **Penanya 1 (Salsabila Labibah, 2413031002)**

**Pertanyaan:** Mengapa proses standard setting menjadi arena kompromi politik-ekonomi

##### **Penjawab (Nurida Elsa, 2413031012)**

**Jawaban:** Karena melibatkan konflik kepentingan antara teori kepentingan publik (*public interest theory*) yang menekankan kesejahteraan sosial dan teori kepentingan kelompok (*interest group theory*) di mana kelompok seperti perusahaan dan politisi melakukan lobi untuk memaksimalkan self-interest mereka akibat kegagalan pasar seperti asimetri informasi. Konsekuensi ekonomi dari standar baru, seperti dampak pada laba perusahaan atau bonus manajer, memicu tarik-ulur politik sehingga pembuat standar bertindak sebagai "insinyur konsensus" untuk mencapai kesepakatan meski mengorbankan independensi teoritis. Hal ini konsisten dengan penelitian yang menunjukkan standar sering gagal diterima jika bertentangan dengan tujuan politik kelompok bisnis.

**Penanya 2 (Alissya Putri Kartika, 2413031011)**

**Pertanyaan:** Bagaimana peran regulator dan perusahaan dalam proses standard setting?

**Penjawab (Serly Natasa, 2413031028)**

**Jawaban :** Regulator seperti Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertanggung jawab menyusun, mengawasi, dan menyesuaikan standar akuntansi seperti PSAK untuk menangani kondisi ekonomi dan politik, termasuk amandemen PSAK 68 dan 71 selama pandemi Covid-19 guna mendukung kelangsungan usaha. Perusahaan berperan sebagai konstituen yang terdampak, sering melobi regulator agar standar selaras dengan kepentingan mereka, seperti menghindari distorsi laba atau biaya tambahan dari pengungkapan informasi. Interaksi ini menciptakan dinamika di mana regulator mempertimbangkan masukan perusahaan untuk memastikan standar dapat diterapkan secara luas.

**Penanya 3 (Indah Rahma Alfiah, 2413031015)**

**Pertanyaan:** Bagaimana kurangnya independensi badan standard setting akibat dinamika politik?

**Penjawab (Eris Ana Dita, 2413031017)**

**Jawaban:** Kurangnya independensi badan standard setting timbul karena lembaga seperti dewan standar kekurangan kekuatan hukum kuat, sehingga mudah dipengaruhi atau dibubarkan oleh kelompok kepentingan politik dan bisnis yang berhasil melobi. Dinamika politik membuat standar mencerminkan kepentingan kelompok dominan daripada kepentingan publik, seperti kegagalan standar yang ditolak komunitas bisnis karena bertentangan dengan tujuan mereka. Independensi memerlukan keberanian regulator untuk menolak lobi, tetapi sering terganggu oleh kondisi ekonomi yang memaksa kompromi demi stabilitas pasar.

## **STUDY KASUS**

1. DSAK hadapi lobi bank besar agar PSAK perbankan longgar hindari beban operasional, plus tekanan pemerintah percepat proses sesuaikan kebijakan nasional. Dinamika politik ganggu timeline/isi standar, ciptakan kompromi antara stabilitas ekonomi domestik dan objektivitas global. Dampak: dukung tujuan makro (tarik investasi) tapi kurangi independensi DSAK; tantangan: ketidakpastian agenda akibat perubahan politik.

### **Pertanyaan :**

Apa dampak terhadap independensi FASB?

### **Penjawab: (Rahma Amelia , 2413031026)**

Jawaban: Lobi intensif perusahaan besar dan asosiasi saat penyusunan standar pengakuan pendapatan memaksa FASB tunda prioritas dan modifikasi substansi agar tidak membebani operasional bisnis, sehingga proses standard setting bergeser dari prinsip teknis murni menjadi kompromi politik-ekonomi. Konsekuensi jangka panjang yaitu seperti, kredibilitas menurun persepsi publik bahwa FASB rentan "permainan politik" melemahkan legitimasi standar akuntansi AS, bias kepentingan: keputusan mencerminkan dominasi kelompok berkuasa, bukan konsensus luas stakeholder, precedens berbahaya, dan lobi sukses dorong intervensi serupa di masa depan, kurangi independensi struktural FASB.

2. DSAK hadapi lobi bank besar agar PSAK perbankan longgar hindari beban operasional, plus tekanan pemerintah percepat proses sesuaikan kebijakan nasional. Dinamika politik ganggu timeline/isi standar, ciptakan kompromi antara stabilitas ekonomi domestik dan objektivitas global. Dampak: dukung tujuan makro (tarik investasi) tapi kurangi independensi DSAK; tantangan: ketidakpastian agenda akibat perubahan politik.

**Pertanyaan:**

Bagaimana tekanan pemerintah memengaruhi timeline dan isi standar PSAK?

**Penjawab: (Revie Neville Extin, 213031027)**

Jawaban: Pemerintah menekan DSAK IAI untuk mempercepat agenda kerja standar, sehingga mengganggu urutan prioritas alami proses standard setting. Contoh dalam makalah: saat DSAK susun PSAK perbankan, tuntutan pemerintah percepat implementasi agar dukung stabilitas sektor keuangan nasional, akibatkan kompresi tahap riset, konsultasi publik, dan revisi draf. Isi PSAK disesuaikan dengan kepentingan makroekonomi pemerintah, seperti longgarkan ketentuan pengungkapan atau pengukuran agar tidak destabilkan perbankan/industri lokal. Makalah sebut tekanan ini ciptakan kompromi: standar kurang ketat demi tarik investasi, tapi kurangi objektivitas teknis dan konvergensi global IFRS.